

PERANAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DI DESA CIKEDUK KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

Dikhorir Afnan¹, Suryo Ediyono²
Universitas Muhammadiyah Cirebon¹, Universitas Sebelas Maret²
afnan23@umc.ac.id

Abstract

Development can be understood as the process of changing social and economic systems according to the will of the country, to achieve the development goal of social change. The role of communication in development must therefore be linked to the direction of such changes. The study employs original-qualitative methods in order to interpret phenomena and to do them in the way of varying methods. Among other things, transparency in the implementation of physical development is the responsibility to prevent potential lapses in power. The village government should be able to provide public and honest information. The study concludes that the sets of villages could ideally play their function as village pr or the managers of information and documentation that are obliged to release information openly and clearly to society.

Keywords: *communication, development, village, information, public*

Abstrak

Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan sistem sosial ekonomi oleh keinginan suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu proses perubahan sosial. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap lingkungan alam yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Pembahasan penelitian ini antara lain menyangkut transparansi pelaksanaan pembangunan fisik dan tanggung jawab pencegahan potensi penyalahgunaan. Pemerintah desa harus mampu memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa idealnya kader desa dapat menjalankan fungsinya sebagai humas desa atau pengelola informasi dan dokumen, serta berkewajiban memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat serta bertanggung jawab penuh.

Kata Kunci: Komunikasi, Pembangunan, Desa, Informasi, Publik

Pendahuluan

Setiap pembangunan di suatu daerah biasanya terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga beberapa pihak swasta sebagai pemilik modal dan pelaku komersial, serta masyarakat itu sendiri yang akan terlibat langsung dalam rencana pembangunan. Namun dalam proses sosialisasi dan realisasi rencana pembangunan tersebut, diperlukan komunikasi aksi. Setiap rencana pembangunan memerlukan komunikasi yang baik dengan semua pihak (*stakeholder*) agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Pembangunan berkelanjutan yang juga disebut tujuan global merupakan pembangunan yang memusatkan pada kebutuhan di masa sekarang tanpa mengompromikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. United Nations Report (2016) menyebut *e-government* sebagai alat yang efektif dan ampuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jelas terlihat oleh Larsson dan Gronlund bahwa sedikit yang diketahui tentang dampak dari *e-government* pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi isu keberlanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui *e-government* adalah masalah perhatian bagi para akademisi dan praktisi. Bahkan

setelah lebih dari dua dekade kerja melelahkan pada layanan pemerintah, teknologi informasi dan komunikasi masih merupakan landasan penting untuk modernisasi proses internal dan eksternal untuk pengiriman layanan pemerintah (Zahid & Din, 2019, p. 1).

Salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan adalah sebuah struktur tata kelola proyek yang efektif (Lechler dan Dvir, 2010). *Project governance* berupaya menciptakan kondisi untuk aturan yang tertata dan tindakan kolektif dengan memberikan representasi resmi pengaturan organisasi yang mengelilingi sebuah proyek tertentu.

Mengingat proyek alam sementara, masing-masing memerlukan struktur tata kelola yang unik meskipun berbeda dari struktur yang relatif stabil dari organisasi yang berpartisipasi (Zwikael & Smyrk, 2015, p. 854). Komunikasi dalam rencana pembangunan penting untuk direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena jika pelaku pembangunan gagal mengomunikasikan rencananya kepada masyarakat, maka dapat menimbulkan konflik sosial.

Pembangunan dapat dipahami sebagai proses mengubah sistem sosial dan ekonomi sesuai dengan kehendak suatu komunitas untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu perubahan sosial. Perubahan pembangunan yang diharapkan tentunya merupakan perubahan yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya, kegiatan komunikasi harus mampu memprediksi gerakan-gerakan

perkembangan. Pengembangan adalah sebuah proses dan lebih menekankan pada keselarasan antara kemajuan eksternal dan kepuasan internal. Dari sudut pandang ilmiah, komunikasi juga mempelajari masalah proses di mana satu orang mengirimkan informasi kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku.

Peran komunikasi dalam pembangunan telah banyak dibahas oleh para ahli, dan secara umum disepakati bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan. Mengikuti istilah tersebut, mereka juga mendefinisikan komunikasi sebagai proses mengkomunikasikan seseorang kepada orang lain, secara langsung atau tidak langsung, melalui media untuk mengubah atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Dari pengertian umum seorang ahli komunikasi, beberapa komponen bekerja dalam proses komunikasi, antara lain aktor lain (komunikator dan komunikan), pesan (gagasan yang dikomunikasikan), media yang digunakan (langsung atau tidak langsung), dan pengaruh.

Semua komponen ini sangat penting untuk keberhasilan proses komunikasi. Berhasil tidaknya proses komunikasi dapat dilihat dari makna yang diterima komunikator, yang memicu komunikator untuk bertindak atas pesan yang disampaikan. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena dari pembangunan diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Peran komunikasi dalam pembangunan juga banyak dibahas oleh para ahli, dan

secara umum disepakati bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan karena tujuan pembangunan adalah perubahan pengetahuan, perubahan perilaku/sikap, dan perubahan taraf hidup.

Muncul atau tidaknya suasana komunikasi selama proses tersebut dapat dilihat dari beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan. Beberapa program yang berhasil di lapangan biasanya disampaikan melalui proses komunikasi yang efektif antara semua komponen, termasuk peserta yang terus bertambah dan pesan yang tersampaikan dengan baik kepada sasaran. Beberapa rencana/proyek pengembangan gagal karena salah satu komponen komunikasi tidak berfungsi dengan baik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Para peneliti kualitatif memberikan laporan yang lebih menyeluruh dan transparan tentang bagaimana mereka mencapai saturasi dalam penelitian mereka, sehingga para pembaca dapat menilai keabsahan klaim ini (Bowen 2008; Francis et al. 2010). Ada kebutuhan tidak hanya untuk pelaporan yang lebih transparan, tetapi juga untuk evaluasi ulang yang lebih menyeluruh tentang bagaimana saturasi dikonsepsi dan dioperasionalisasi, termasuk pengakuan terhadap potensi inkonsistensi dan kontradiksi dalam penggunaan konsep-konsep — evaluasi ulang mengikuti empat pendekatan yang telah diidentifikasi dan implikasinya untuk tujuan dan penggunaan saturasi (Saunders et al., 2018, p. 1904).

Penjelasan dan penafsiran-pada penelitian kualitatif-dapat dilihat berasal dari pendekatan phenomenological and hermeneutik pada objek penelitian tersebut. Model dua dimensi dari berbagai epistemologis termasuk sudut pandang para peneliti dekat dan/atau jauh dari teks. Kedekatan itu berarti lebih banyak uraian dan penafsiran yang konkret; Jarak dari teks berarti lebih abstrak pelangan dan interpretasi-interpretasi. Selama analisis, peneliti kualitatif sering kali mengawetkannya dengan menyortir isi yang berisi kode ke dalam kategori dan terus mencari isi yang terlata dan merumuskan hal sebagai tema pada berbagai tingkat. Oleh karena itu, peneliti mengambil berbagai posisi ilmiah bergantung pada tujuan penelitian (Graneheim et al., 2017, p. 30).

Penelitian kualitatif sangat cocok untuk memahami fenomena dalam konteksnya, mengungkap hubungan antara konsep dan perilaku, dan menghasilkan dan menyempurnakan teori (Glaser dan Strauss 1967; Miles dan Huberman 1994; Crabtree dan Miller 1999; Morse 1999; Ragin 1999; Sofaer 1999; Patton 2002; Campbell dan Gregor 2004; Quinn 2005). Berbeda dari pekerjaan kualitatif, penelitian kuantitatif berusaha untuk menghitung kejadian, membangun hubungan statistik antara variabel, dan menggeneralisasi temuan ke populasi dari mana sampel diambil. Meskipun metode kualitatif dan kuantitatif secara historis dipandang sebagai saling eksklusif, perbedaan kaku semakin diakui sebagai tidak pantas dan kontraproduktif (Ragin 1999; Sofaer 1999; Creswell 2003;

Skocpol 2003). Pendekatan metode campuran (Creswell 2003) dapat mencakup kedua metode yang digunakan secara bersamaan atau berurutan, jika sesuai (Bradley et al., 2007, p. 1759).

Hasil dan Pembahasan Komunikasi sebagai Sarana Membangun Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah konstruksi kompleks yang sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan (Simpson, 2007). Akibatnya, itu tetap menjadi istilah yang sulit dipahami dalam literatur ilmu sosial dan sering digunakan dengan cara yang berbeda dan tidak selalu kompatibel. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, secara universal diterima bahwa kepercayaan adalah "keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang lain" (Rousseau dkk dalam (Nunkoo et al., 2012, p. 1542).

Komunikasi memainkan peranan yang penting sebagai penghubung antarmanusia. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk menyamakan tujuan dari pesan itu sendiri. Komunikasi antarpribadi atau interpersonal menjadi elementer dalam kehidupan umat manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Komunikasi antarpribadi dianggap kompeten dalam mengubah sikap dan perilaku manusia menjadi lebih baik. Komunikasi didefinisikan sebagai alat penghubung antarindividu. Hubungan antarpribadi ini sering dikenal dengan hubungan interpersonal. Komunikasi dalam

hubungan antarpribadi diasumsikan tidak hanya mementingkan isi pesan yang disampaikan, tetapi juga mengkaji tentang pola hubungan yang terjalin antarindividu tersebut.

Pada teori modal sosial (Bourdieu, 1986) menjelaskan pengaruh hubungan sosial dan hubungan sosial mengenai pencapaian. Menurut Nahapiet dan Ghoshal, dimensi teori modal sosial secara berulang-ulang memaksudkan kepercayaan, kewajiban, dan identifikasi (komitmen) yang ada dalam hubungan pribadi antara orang atau kepercayaan, respek, dan persahabatan timbal balik yang muncul dari hubungan erat antara mitra. Modal relasi menawarkan lensa teoritis yang relevan, sejauh kepercayaan mewakili elemen dasar dan dikembangkan melalui sejarah interaksi (Akrouf & Nagy, 2018, p. 940).

Paham aphorisme mengatur agar komunikasi lancar adalah bahwa orang-orang perlu mendengar dan peduli sebelum mereka memperhatikan apa yang mereka dengar. Komunikasi yang berhasil membutuhkan pembangunan dan dukungan kepercayaan publik. Komponen utama kepercayaan dengan sejumlah dimensi yang diusulkan berpusat pada konsep kompetensi, perawatan, keadilan dan keterbukaan dalam cara publik mengenali institusi atau aktor individu (Hooker et al., 2017, p. 2). Menjadi pemimpin di desa juga harus memiliki kemampuan mengelola desa dengan baik dan profesional. Adapun mengenai mekanisme pengaturan desa telah banyak diatur dalam berbagai regulasi dan perundang-undangan.

Mekanisme pengaturan desa idealnya harus berasaskan: (1) *Confession*; (2) *Subsidiarity*; (3) *Religion*; (4) *Togetherness*; (5) *Mutual cooperation*; (6) *Family*; (7) *Deliberation*; (8) *Democracy*; (9) *Independence*; (10) *Participation*; (11) *Equality*; (12) *Empowerment*; (13) *Sustainability*.

Berdasarkan pengamatan penulis, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya Pemerintah Desa Cikuduk, Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sudah cukup positif. Hal ini ditandai dengan keberlangsungan program-program pemerintah desa yang secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar. Kinerja aparaturnya desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga dinilai bisa diandalkan. Kepala Desa Cikuduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sarifudin menjelaskan, terkait mekanisme pelaksanaan penyaluran dana BLT melalui dana desa, pemerintah desa senantiasa melibatkan stakeholders, seperti Linmas, BPD, RT/RW, dan perwakilan masyarakat. Teknis penyaluran dana BLT tersebut berpedoman pada juklak dan juknis tentang dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada. Adapun teknis penyalurannya dilakukan secara simbolik di kantor desa, untuk selanjutnya disalurkan langsung ke warga secara *door to door* atau dari rumah ke rumah.

Gambar 1



Aparatur desa Cikeduk didampingi anggota Linmas dan RT saat menyalurkan dana BLT secara *door to door* ke salah satu penerima bantuan sosial. (Foto: Dok Royadi)

Meski ada sebagian warga yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan kuota bantuan dana BLT, namun secara umum warga cukup mengapresiasi kinerja aparatur desa setempat. Dalam Pasal 7 UU tentang Pemberdayaan Desa, ditegaskan bahwa desa berhak mendapatkan dana desa dengan maksud pemberian dana desa tersebut sebagai bantuan stimulan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam membangun desanya masing-masing. Kualitas komunikasi dapat digambarkan sebagai berbagi informasi risiko secara formal dan informal di antara rekan kerja. Itu berarti kualitas informasi yang dipertukarkan dapat memudahkan mengatasi risiko yang dihadapi.

Morgan dan Hunt (dalam Y. Can Saglam et al, 2022:4) menyatakan bahwa kualitas komunikasi dievaluasi oleh tiga aspek: relevan dengan pokok bahasan, tepat waktu, dan dapat diandalkan.

Komunikasi sebagai Sarana Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja secara umum dapat memiliki tujuan internal atau eksternal. Alat pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai instrumen manajemen internal, memungkinkan organisasi untuk menilai kinerja mereka dan mendukung pengambilan keputusan internal. Di sisi lain, alat-alat manajemen kinerja dengan tujuan eksternal digunakan untuk pelaporan eksternal dan memiliki tujuan utama pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Suatu tujuan yang berbeda menyiratkan rancangan yang berbeda dari sistem ukuran kinerja. Terlepas dari keragaman dalam organisasi dan sistem pengukuran kinerja, konsensus pada beberapa aspek kinerja organisasi adalah multidimensi (Cruce & Decramer, 2016, p. 3).

Akuntabilitas dalam organisasi-organisasi biasanya berpusat pada perlindungan misi sosial—melaksanakan kepedulian, kesetiaan, dan kepatuhan dalam melayani tujuan sosial organisasi (Chisolm, 1995; Fremont-Smith, 2004). Sukses didefinisikan dalam hal kemajuan menuju misi sosial. Memastikan akuntabilitas untuk misi sosial, bagaimanapun, diperumit oleh kurangnya standar umum atau tolok ukur untuk pengukuran kinerja sosial, dan kesulitan umum untuk membandingkan kinerja sosial di

seluruh organisasi (Ebrahim & Rangan dalam (Ebrahim et al., 2014, p. 85).

Dalam konteks komunikasi di level organisasi-meskipun ranahnya bisa juga melalui pendekatan komunikasi organisasi-komunikasi yang baik antara sesama perangkat desa (internal) maupun dengan masyarakat (eksternal) sudah tidak bisa ditawar lagi jika ingin tujuan organisasi dapat terwujud. Bukan menjadi rahasia umum bahwa polemik antara pemerintah desa dengan masyarakat salah satunya terjadi karena bangunan komunikasi yang rapuh selain ada faktor-faktor pemicu lainnya. Sejumlah persoalan pelayanan publik yang seringkali dihadapi oleh pemerintahan desa di antaranya

(<https://merdesa.id/permasalahan-pelayanan-di-desa/>):

Pemimpin desa yang ideal adalah mampu membawa masyarakat dan desanya mencapai kesejahteraan, senantiasa melayani masyarakat secara penuh selama 24 jam, serta mengedepankan prakarsa masyarakat. Tipe kepemimpinan yang coba dibangun oleh aparatur desa Cikuduk ini menurut penulis adalah tipe kepemimpinan yang inovatif-progresif. Aparatur desa tampak berusaha keras untuk senantiasa melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakatnya. Mereka meminta kepada masyarakat untuk mengawasi akuntabilitas kinerja mereka setiap saat untuk dapat disampaikan kepada publik. Upaya-upaya yang dilakukannya itu tidak lain sebagai bagian dari menciptakan pemerintahan desa yang terbuka atau transparan. Petugas Puskesmas Desa Cikuduk, Novi Ariyanti mengakui

adanya sikap transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Cikuduk. Dalam penyaluran dana BLT misalnya, sebelum teknis penyaluran didistribusikan kepada masyarakat, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk menyosialisasikan program ini, pemerintah desa menugaskan aparaturnya untuk menginformasikan melalui papan informasi yang ada di desa, tapi kebanyakan dilakukan langsung oleh RT masing-masing. Mereka ditugaskan melakukan verifikasi ke rumah-rumah warga yang dinilai layak menerima BLT. Menurut Novi, petugas Puskesmas, aparatur desa memiliki peran sebagai fasilitator masyarakat dalam penyaluran bantuan kesejahteraan rakyat baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Seperti; PKH, BPNT, BSPS, termasuk BLT. Puskesmas juga terlibat langsung dalam proses verifikasi calon penerima BLT sekaligus memberikan rekomendasi terhadap KPM yang dianggap sudah mampu. Puskesmas ikut bertanggung jawab dalam melaporkan hasil kerjanya kepada dinas terkait. Pada penyaluran dana BLT periode triwulan pertama 2020 lalu misalnya, tercatat ada sebanyak 174 kepala keluarga yang menerima dana bantuan senilai Rp600 ribu/bulan atau 30 persen dari total anggaran dana desa yang masuk ke kas Desa Cikuduk. Teknis pencairan dana sosial tersebut dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan terbuka.

Komunikasi sebagai Media Informasi Terbuka

Komunikasi yang transparan dan terbuka menyeimbangkan tujuan organisasi dengan kepentingan sosial umum dan dapat membantu public dan pemangku kepentingan menerima organisasi (Jahansoozi, 2006; Milne, Rohm, & Bahl, 2009). Dari sudut pandang ini, transparansi berkaitan dengan persepsi pemangku kepentingan tentang saling menghormati antara suatu organisasi dan para pemangku kepentingan serta keterbukaan komunikasi (Rawlins, 2009). Definisi transparansi dalam literatur komunikasi bervariasi dan sering disederhanakan (Albu & Wehmeier, 2014; Sisco & McCorkindale, 2013). Meskipun tidak ada definisi universal tentang transparansi (Sisco & McCorkindale, 2013), para pakar setuju bahwa hal itu berhubungan dengan keterbukaan, kebenaran, kebutuhan informasi publik (Taiminen et al., 2015, p. 735).

Di era keterbukaan informasi publik, kondisi ini disebut sebagai interaksi antara tata kelola, peraturan, dan etika. Tata kelola adalah pembentukan dan pemeliharaan kebijakan, prosedur dan standar-menentukan apa yang bergerak mungkin dalam permainan-untuk berbicara. Peraturan adalah undang-undang yang diberlakukan melalui norma sosial dan pemerintahan. Dalam kerangka ini, peraturan membentuk tata kelola pemerintahan melalui kepatuhan hukum, sedangkan etika, terutama etika terapan, membentuk tata kelola melalui evaluasi moral. Oleh karena itu, seraya berupaya untuk bergerak menuju masyarakat yang baik,

masyarakat seringkali menghadapi problem koordinasi (Nelson & Gorichanaz, 2019, p. 2).

Ketika media ini dan yang lebih baru menyebar, proporsi model organisasi, operasi, dan transaksi yang meningkat adalah murni elektronik (misalnya, Kang & Norton, 2004). Penyebaran media baru juga secara signifikan meningkatkan kemampuan organisasi nirlaba untuk berkomunikasi dengan klien serta regulator, sukarelawan, media, dan masyarakat umum (misalnya, Waters, 2007). Melalui konten yang ditargetkan secara strategis, perusahaan dapat memobilisasi pemangku kepentingan, membangun hubungan yang bermakna, dan pada akhirnya mendorong peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik (Saxton & Guo, 2011). Interaksi nonprofit/pemangku kepentingan online telah secara efektif menjadi lebih dan lebih di mana-mana, beragam, dan penting untuk kinerja organisasi (Lovejoy & Saxton, 2012, p. 338).

Pemerintah Desa Cikuduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas kinerja, tidak terkecuali dalam upaya menggunakan komunikasi sebagai media informasi yang terbuka. Tempat bagi pemuda setempat untuk terlibat dalam pengembangan masyarakat adalah forum Karang Taruna. Setiap kali informasi tentang organisasi pemuda nasional dirilis, setiap koordinator distrik segera menerima informasi dari pemuda non-aktif. Petugas humas desa di setiap desa mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan

memberikan kejelasan tentang masalah masyarakat kepada publik. Masyarakat desa bekerja menuju kemandirian dengan meningkatkan kesadaran, keterampilan dan kemampuan, serta perilaku dan sumber daya. Membuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk membantu desa memenuhi kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan.

Setiap upaya pembangunan desa perlu diawali dengan musyawarah masyarakat tentang program pembangunan desa. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah (<https://www.iainjatimur.or.id/course/interest/detail/24>). Diakses pada 11 November 2022 pukul 11.11 WIB).

Gambar 2



Pada Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa: (A) Pada fase mengadakan musrenbang ini, setiap ketua rukun tetangga harus mengajukan proposal pembangunan di dusunnya masing-masing. (B) Pada fase kedua ini, aparat desa perlu melakukan review untuk menentukan program pembangunan yang sesuai dengan ketersediaan anggaran. (C) Pada fase usulan rancangan anggaran belanja desa, aparat desa bisa menyampaikannya secara online. (D) Setelah semua proses dilalui dan dana desa dicairkan, perangkat desa kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat perihal pembahasan teknis pelaksanaan pembangunan desa.

UU Desa menjamin hak informasi warga dan menekankan kewajiban pemerintah desa untuk menegakkan hak informasi warga. Hal ini tertuang dalam Pasal 82 UU Desa yang mengatur bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Palupi dkk, 2016:65). Tata pemerintahan yang baik membutuhkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu

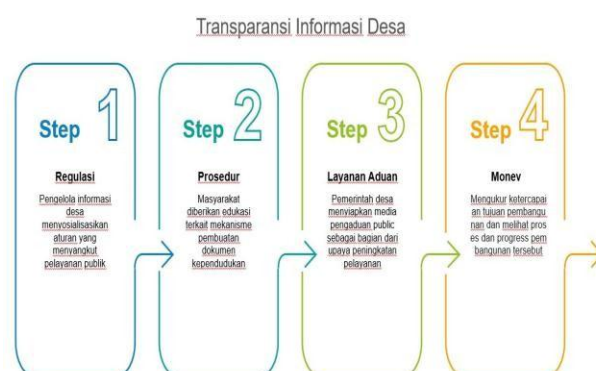
landasannya, dan kebebasan informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatif. Semakin terbuka pemerintah terhadap pengawasan publik, semakin akuntabel (Subagiyo, 2009:4).

Dalam perspektif bisnis misalnya, digitalisasi telah membuka berbagai kemungkinan bagi organisasi untuk berinteraksi dengan pelanggan (Amit dan Zott, 2001; Aspara dkk., 2013; Chesbrough, 2010; Khanagha et al, 2014; Wirtz dkk., 2010). Magretta (2002:89) menyoroti bahwa istilah "model bisnis" mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an dengan munculnya komputer dan *spreadsheets* pribadi karena para perencana strategis pada waktu itu sanggup menguji beragam asumsi untuk memprediksi keuntungan dari menghasilkan aliran pendapatan baru dan struktur biaya yang berubah. Velu (2017:605) menekankan bahwa sistem kegiatan ini perlu untuk saling sejajar agar dapat mengembangkan mekanisme yang efisien (Warner & Wäger, 2019, p. 329).

Pemerintah desa juga harus mampu menunjukkan ketegasannya dalam menindak praktik percaloan yang kerap kali menjadi keluhan warga terutama dalam mengurus pembuatan KK dan KTP. Perilaku transparan menjadi sangat krusial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bentuk transparansi yang diterapkan bukan hanya duduk perkara dana saja, akan tetapi buat

semua pelayanan harus berusaha selalu transparan. Jika terdapat aparat desa melakukan pungli, kepala desa harus mampu memberikan hukuman tegas. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan pelayanan, maka mekanisme pembuatan KK dan KTP misalnya wajib terlebih dahulu melalui RT/RW.

Gambar 3



Kebijakan pemerintah desa sebenarnya merupakan implementasi dari UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara dan penduduknya terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kemanfaatan umum. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat pemerintah baik di tingkat desa maupun pusat terutama untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kinerjanya. Pelayanan publik harus dilakukan secara transparan oleh setiap unit pelayanan instansi. Kualitas kinerja pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan bersama. Transparansi harus ada dalam semua

aspek pelayanan manajemen, mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan publik hingga pelaporan hasil.

Simpulan

Berhasil tidaknya proses komunikasi dapat dilihat dari makna yang diterima komunikator yang memicu komunikator untuk bertindak atas pesan yang disampaikan. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena dari pembangunan diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Peran komunikasi dalam pembangunan bertujuan untuk perubahan pengetahuan, perubahan perilaku, dan perubahan taraf hidup. Program pembangunan yang berhasil di lapangan biasanya disampaikan melalui proses komunikasi yang efektif antara semua komponen, termasuk peserta yang terus bertambah dan pesan yang tersampaikan dengan baik kepada sasaran.

Beberapa rencana pengembangan gagal karena salah satu komponen komunikasi tidak berfungsi dengan baik. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu landasannya, dan kebebasan informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatif. Semakin terbuka pemerintah terhadap pengawasan publik, maka semakin akuntabel.

Daftar Pustaka

Akrouf, H., & Nagy, G. (2018). Trust and commitment within a virtual brand community: The

mediating role of brand relationship quality. *Information and Management*, 55(8), 939–955.

<https://doi.org/10.1016/j.im.2018.04.009>

Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health services research: Developing taxonomy, themes, and theory. *Health Services Research*, 42(4), 1758–1772.

<https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x>

Crucke, S., & Decramer, A. (2016). The development of a measurement instrument for the organizational performance of social enterprises. *Sustainability (Switzerland)*, 8(2).

<https://doi.org/10.3390/su8020161>

Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. *Research in Organizational Behavior*, 34, 81–100.

<https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001>

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse Education Today*, 56(June), 29–34.

<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002>

Hooker, C., Capon, A., & Leask, J. (2017). Communicating about risk: Strategies for situations where public concern is high but the risk is low. *Public*

- Health Research and Practice*, 27(1), 1–5.
<https://doi.org/10.17061/phrp2711709>
- Lovejoy, K., & Saxton, G. D. (2012). Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 337–353.
<https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01576.x>
- Nelson, J., & Gorichanaz, T. (2019). Trust as an ethical value in emerging technology governance: The case of drone regulation. *Technology in Society*, 59(July 2018), 101131.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.04.007>
- Nunkoo, R., Ramkissoon, H., & Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. *Annals of Tourism Research*, 39(3), 1538–1564.
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.04.004>
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. *Quality and Quantity*, 52(4), 1893–1907.
<https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>
- Taiminen, K., Luoma-aho, V., & Tolvanen, K. (2015). The transparent communicative organization and new hybrid forms of content. *Public Relations Review*, 41(5), 734–743.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.06.016>
- Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349.
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>
- Zahid, H., & Din, B. H. (2019). Determinants of intention to adopt e-government services in Pakistan: An imperative for sustainable development. *Resources*, 8(3).
<https://doi.org/10.3390/resources8030128>
- Zwikael, O., & Smyrk, J. (2015). Project governance: Balancing control and trust in dealing with risk. *International Journal of Project Management*, 33(4), 852–862.
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.10.012>

Website:

<https://merdesa.id/permasalahan-pelayanan-di-desa/>

<https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/24>.